



djp

2024

LAPORAN KINERJA

KPP Pratama Pamekasan



Kantor
Pajak

PAMEKASAN



Jl. Raden Abdul Azis No.111

Kec. Pamekasan, Kabupaten Pamekasan

Kata Pengantar

Dengan rasa syukur dan kebahagiaan, kami menyampaikan Laporan Kinerja Tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan sesuai dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak nomor ND-8/PJ/2025 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Laporan Kinerja merupakan bagian dari sistem akuntabilitas dan transparansi pengelolaan kinerja KPP Pratama Pamekasan yang berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) selama tahun 2024. Laporan ini merupakan hasil dedikasi dan kerja keras seluruh Pegawai KPP Pratama Pamekasan yang berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada wajib pajak serta mencapai target penerimaan yang telah ditetapkan.

Tahun 2024 menjadi tahun yang penuh tantangan dan perubahan signifikan di berbagai sektor. Meskipun demikian, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan tetap berusaha untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kepatuhan perpajakan.

KPP Pratama Pamekasan senantiasa optimis dan berupaya untuk terus menyempurnakan kinerja sehingga tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai dengan harapan stakeholder. KPP Pratama Pamekasan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada masyarakat Kabupaten Pamekasan dan Sumenep atas kontribusi dalam mendukung KPP Pratama Pamekasan untuk menghimpun penerimaan negara.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja ini masih jauh dari kata sempurna, kami akan terus berupaya melakukan perbaikan untuk menyajikan laporan yang akurat dan akuntabel. Akhir kata, Laporan Kinerja Tahun 2024 ini kami susun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan kinerja selama tahun 2024 secara akuntabel dan bahan evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.

Pamekasan, 24 Januari 2025
Kepala KPP Pratama Pamekasan,



Ditandatangani secara elektronik
Rahmat Basuki

Ringkasan Eksekutif

KPP Pratama Pamekasan sebagai unit pelaksana tugas vertikal di bawah Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas untuk menghimpun penerimaan negara dengan memenuhi target penerimaan pajak. KPP Pratama Pamekasan menjadi perwakilan Direktorat Jenderal Pajak sebagai mitra dalam menjalin hubungan kerja sama yang setara dengan seluruh pemangku kepentingan khususnya di wilayah Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya KPP Pratama Pamekasan menerapkan Asas Akuntabilitas. Laporan Kinerja KPP Pratama Pamekasan 2024 adalah wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Vertikal yang mendukung terwujudnya *good governance* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

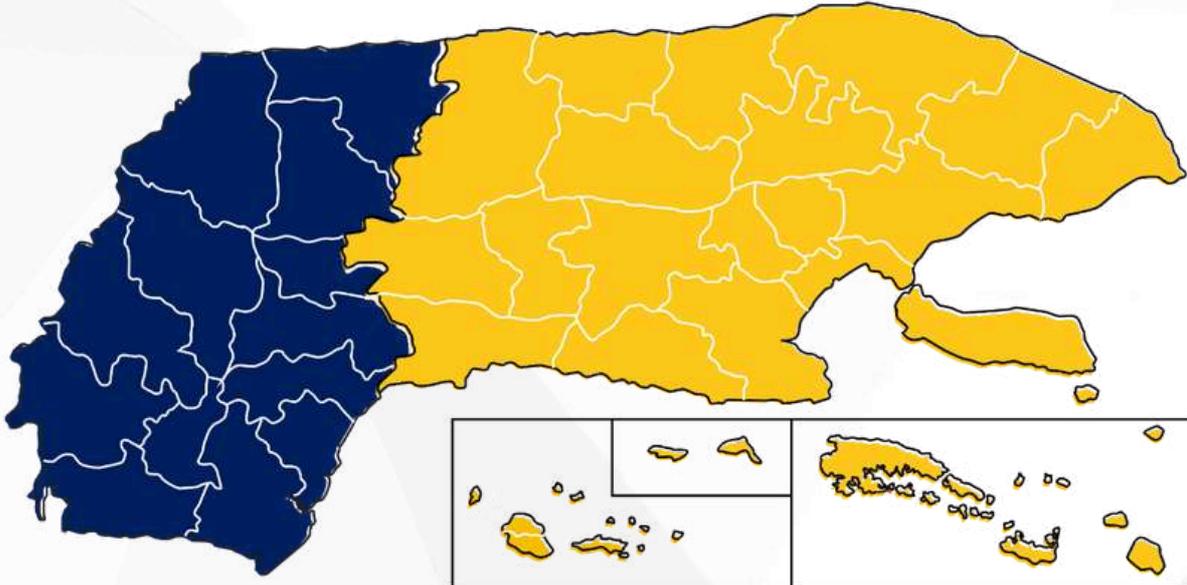
KPP Pratama Pamekasan Merupakan Instansi pemerintah yang mempunyai peran sebagai penghimpun penerimaan perpajakan di wilayah Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep. Pada tahun 2024, KPP Pratama Pamekasan memiliki 86 pegawai yang terbagi menjadi 9 seksi dan 1 unit kantor di bawahnya. KPP Pratama Pamekasan mendapat Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 109,59. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif yaitu *Stakeholder Perspective* (30,72), *Customer Perspective* (20,25), *Internal Process Perspective* (29,28), *Learning and Growth Perspective* (29,32) yang masih terbagi menjadi 10 Sasaran strategis. Setiap sasaran strategis tersebut dirinci kembali menjadi 20 Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta targetnya yang ditetapkan sebagai standar kinerja tahun 2024



Nilai Kinerja Organisasi

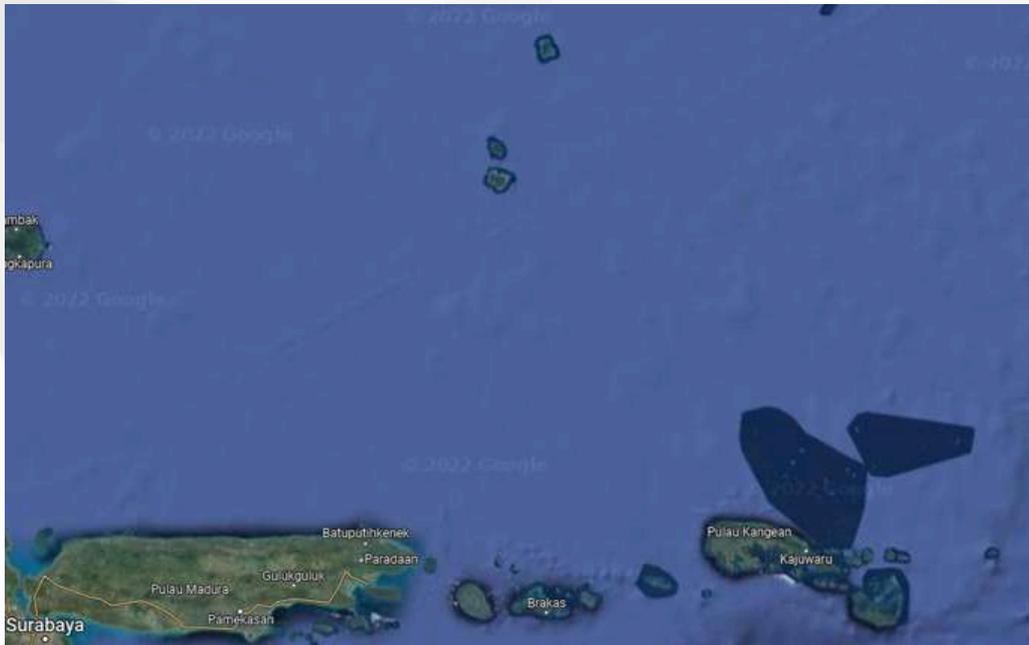
Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>							30,00%	102,44
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							102,44
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,57%	Max	E/L	26%	57,78%	100,57
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	105,00	Max	P/L	19%	42,22%	105,00
<i>Customer Perspective</i>							20,00%	101,27
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							101,11
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,48%	Max	E/L	26%	57,78%	100,48
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	101,98%	Max	P/L	19%	42,22%	101,98
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							101,42
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	101,42%	Max	E/M	21%	100,00%	101,42
<i>Internal Process Perspective</i>							25,00%	117,12
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							115,45
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	110,90%	Max	E/M	21%	50,00%	110,90
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	120,00%	Max	P/M	14%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							117,83
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	115,60%	Max	P/M	14%	33,33%	115,60
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	33,33%	120,00
6c-N	Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	117,89%	Max	P/M	14%	33,33%	117,89
7	Penegakan hukum yang efektif							112,31
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	118,58%	Max	P/M	14%	26,92%	118,58
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	93,02%	Max	P/L	19%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19%	36,54%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase pengumpulan data regional dari ILAP	55,00%	82,33%	Max	P/L	19%	57,58%	120,00
<i>Learning & Growth Perspective</i>							25,00%	117,29
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							114,59
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,49	Max	P/M	14%	33,33%	117,49
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	98,35	Max	P/M	14%	33,33%	115,71
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	99,51	Max	P/M	14%	33,33%	110,57
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								109,50

Wilayah Kerja



PAMEKASAN
LUAS WILAYAH : 792,30 KM2
JUMLAH KECAMATAN : 13
JUMLAH KELURAHAN/ DESA : 189
JUMLAH PENDUDUK : 850.057 JIWA

SUMENEP
LUAS WILAYAH : 2.093,47 KM2
JUMLAH KECAMATAN : 27
JUMLAH KELURAHAN/DESA : 334
JUMLAH PENDUDUK : 1.124.436 JIWA



Daftar Isi

PENDAHULUAN

Latar Belakang	1
Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi	2
Sistematika Laporan	5

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Strategis	6
Perjanjian Kinerja	7

PERENCANAAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja	8
Realisasi Anggaran	70

PENUTUP

Kata Penutup	71
--------------	----

A photograph of a person in traditional green and red clothing driving a wooden cart pulled by a grey water buffalo. The cart is decorated with colorful flags and ornaments. The background shows a blue sky with white clouds and a dirt road. The image is framed by a white geometric pattern.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Pamekasan mempunyai tugas yaitu melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, serta Pajak Bumi dan Bangunan dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dengan fokus penerimaan kewilayahan, sebagai instansi pemerintah yang dibiayai oleh APBN untuk menghimpun penerimaan pajak di Kabupaten Pamekasan dan Sumenep, KPP Pratama Pamekasan memiliki kewajiban untuk mengemban tugas mengumpulkan penerimaan pajak yang telah ditetapkan sebesar Rp527.449.380.000 pada tahun 2024.

Dalam rangka mempertanggungjawabkan tugas tersebut KPP Pratama Pamekasan memiliki kewajiban untuk membuat Laporan Kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.09/2016 tentang Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Laporan ini merupakan laporan berkala yang disusun KPP Pratama Pamekasan sebagai salah satu media reuiu pelaksanaan kegiatan tugas dan fungsi KPP Pratama Pamekasan. dalam satu tahun terakhir. Selain itu laporan ini juga bertujuan untuk menjadi media pemacu peningkat kinerja. Untuk itu dalam pembuatan laporan kinerja digunakan data yang akurat dan akuntabel. Sehingga Laporan Kinerja yang disusun mempunyai kualitas yang baik dan mencerminkan keadaan sesungguhnya.

B. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi

Tugas

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Pamekasan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

KPP Pratama Pamekasan memiliki fungsi sebagaimana berikut:

1. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
2. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
3. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
4. pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
5. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
6. pemberian dan/ atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
7. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
8. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
9. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
10. penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
11. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
12. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
13. pemutakhiran basis data perpajakan;
14. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
15. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
16. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
17. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
18. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
19. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
20. pelaksanaan administrasi kantor.

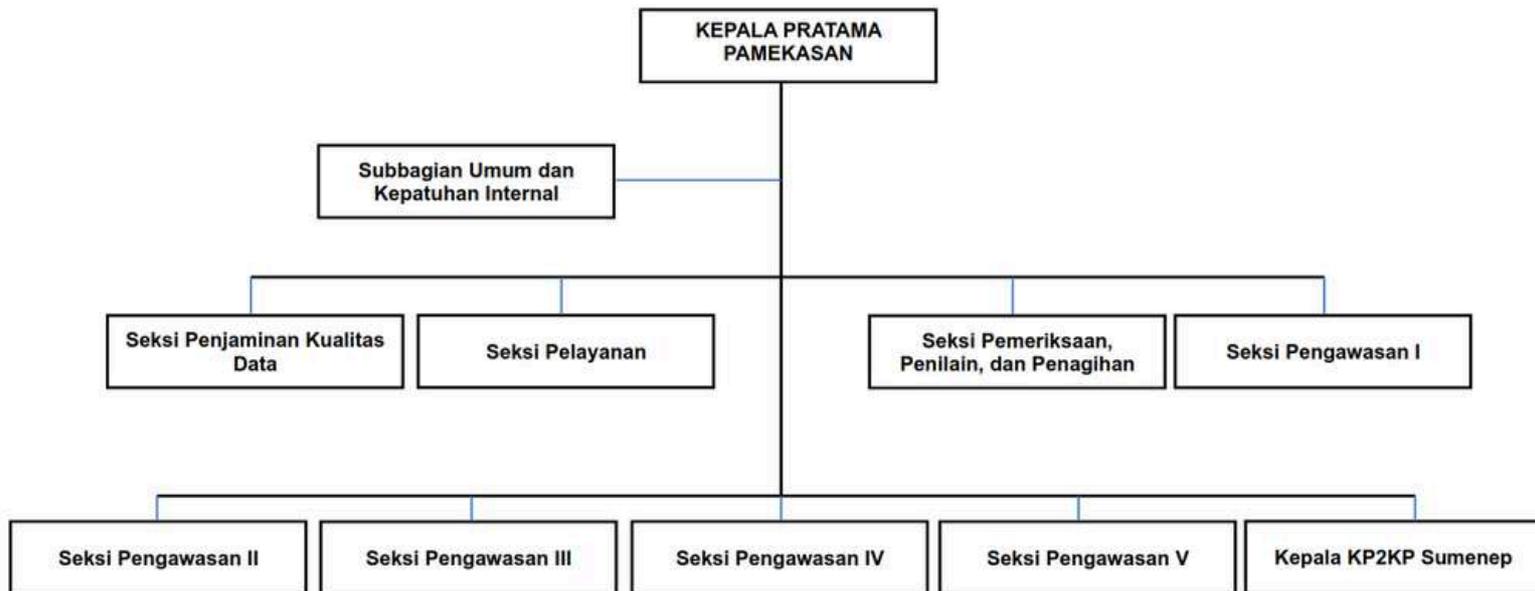
Struktur Organisasi

KPP Pratama Pamekasan yang berkedudukan di Kabupaten Pamekasan, dengan wilayah kerja Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep, dalam menjalankan tugas dan fungsinya dipimpin oleh Kepala Kantor yang membawahi 8 (delapan) Kepala Seksi, 1 (satu) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal, 1 (satu) Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak dan Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak dengan tugas sebagai berikut:

- Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.
- Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencanan, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.

- Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/ atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.
- Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset takberwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.
- Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, dan Seksi Pengawasan V masing-masing mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (mapping) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.
- Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pencanan, dan pengolahan data, pengamatan potensi pajak, dan penyajian informasi perpajakan, melakukan edukasi dan konsultasi pajak, pelayanan, pengawasan, dan ekstensifikasi pajak, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Pratama.
- Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan pemeriksaan pajak. Kelompok Jabatan Fungsional ini berada di bawah Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan. Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak dan Asisten Penyuluh Pajak mempunyai fungsi edukasi pajak. Kelompok Jabatan Fungsional ini berada dibawah Seksi Pelayanan.

Diagram Organisasi



C. Sistematika Laporan

Laporan Kinerja KPP Pratama Pamekasan disusun dengan diawali kata pengantar Kepala KPP Pratama Pamekasan yang diikuti dengan Ringkasan Eksekutif. Untuk pendahuluan Laporan Kinerja akan disajikan latar belakang penyusunan Laporan Kinerja, selanjutnya untuk lebih mengenal KPP Pratama Pamekasan diuraikan tugas, fungsi, dan struktur organisasi.

Pada BAB selanjutnya akan disajikan perencanaan kinerja KPP Pratama Pamekasan yang berisi perencanaan strategis dan perjanjian kinerja tahun 2024, setelah perjanjian kinerja untuk menjamin akuntabilitas kinerja akan disajikan capaian kinerja organisasi, Realisasi anggaran, efisiensi penggunaan sumber daya, kinerja lain-lain, evaluasi dan peningkatan akuntabilitas kinerja KPP Pratama Pamekasan.

Sebagai penutup akan disajikan ringkasan umum capaian kinerja organisasi serta langkah di masa yang akan mendatang yang akan dilakukan KPP Pratama Pamekasan untuk meningkatkan kinerja organisasi.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan yang merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang dituntut untuk dapat memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak sesuai tugas dan fungsinya.

Visi yang ingin diwujudkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan sebagai instansi vertikal dibawah Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II adalah Menjadi Instansi Pemerintah dengan Pelayanan Kepada Masyarakat Nomor Satu di Pulau Madura, dengan Misi Memberikan Pelayanan Perpajakan Sesuai Peraturan Undang-Undang yang Memuaskan, Solutif, dan Aplikatif. Visi KPP Pratama Pamekasan sesuai dengan visi Direktorat Jenderal Pajak adalah menjadi mitra terpercaya pembangunan bangsa untuk menghimpun penerimaan negara melalui penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efisien, efektif, berintegritas, dan berkeadilan dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan". Hal ini menegaskan bahwa KPP Pratama Pamekasan ingin menjadi institusi pemerintah yang lebih baik dari institusi lain dalam hal penerimaan negara dari sektor pajak.

Selain itu terdapat misi yang diemban oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu :

1. merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
2. meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
3. mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Kalimat tersebut mempunyai makna bahwa KPP Pratama Pamekasan, ingin menerapkan sistem administrasi perpajakan yang modern berbasis pada teknologi tetapi tetap berpedoman pada Undang - Undang perpajakan sehingga memberikan keadilan pada Wajib Pajak dan pada akhirnya berdampak positif terhadap kemakmuran masyarakat.

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan, program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Dalam rangka mencapai tujuan serta memastikan terpenuhinya Visi DJP sebagaimana disebutkan di atas, KPP Pratama Pamekasan sebagai Kemenkeu Three melakukan penetapan Sasaran Strategis sebagai berikut:

Perjanjian Kinerja

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Target	
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum yang efektif	07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75%
		07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		08b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100



BAB III AKUNTABILITAS KERJA

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan adalah sebesar 109,59%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagai berikut:

- *Stakeholders Perspective* dengan bobot 30%, Indeks Capaian 30,73;
- *Customers Perspective* dengan bobot 20%, Indeks Capaian 20,25;
- *Internal Process Perspective* dengan bobot 25%, Indeks Capaian 29,28;
- *Learning and Growth Perspective* dengan bobot 25%, Indeks Capaian 29,32.

Perbandingan jumlah IKU berdasarkan indeks capaian tertuang dalam tabel berikut:

Perspective	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
Stakeholder	30%	30,73
Customer	20%	20,25
Internal Process	25%	29,28
Learning & Growth	25%	29,32

Sumber: Aplikasi MANDOR DJP

1. Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal

A. (01a-CP) Persentase realisasi penerimaan pajak

1. Perbandingan antara Target Awal Tahun dengan Realisasi dan Capaian IKU

T/R	Q1	Q2	Sem.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	16,00%	37,00%	37,00%	63%	63%	100%	100%
Realisasi	16,47%	42,06%	42,06%	67,24%	67,24%	100,57%	100,57%
Capaian	102,94%	113,68%	113,68%	106,73%	106,73%	100,57%	100,57%

Sumber: Aplikasi MANDOR DJP

• Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

• Definisi Indikator Kinerja Utama

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

• Formula Indikator Kinerja Utama

$(\text{Realisasi penerimaan pajak} / \text{Target penerimaan pajak}) \times 100\%$

• Realisasi IKU

No	Kelompok Pajak	Target 2024	Realisasi s.d 31 Desember 2024 (Dalam Miliar Rupiah)					
			2023	2024	% Growth 2023	% Growth 2024	% Penc. 2023	% Penc. 2024
1	PPN dan PPnBM	165,94	192,52	257,83	-3,63	33,92	102,83	156,32
2	PPH Non Migas	289,97	200,13	252,05	17,93	25,95	108,64	86,92
3	Pendapatan atas PL dan PIB	21,97	17,23	17,48	-9,31	1,42	92,75	79,56
4	PBB dan BPHTB	0,203	1,8	3,05	-53,54	68,86	61,26	1498,22
5	PPH Migas	0	0,009	0	523,33	-100%	0	0
Total		477	411,93	530,43	4,43	28,77	104,72	111,18

Sumber: MPN Info s.d 31 Desember 2024

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp530.432.537.822 dengan capaian sebesar 111,18% dari target sebesar Rp477.095.608.000. Realisasi pada periode ini tumbuh sebesar 28,77%, lebih baik dibandingkan tahun lalu yang mencatat pertumbuhan sebesar 4,43%.

No	Jenis Pajak	Target 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Pertumbuhan 2024	Pencapaian 2024
A	PPN dan PPnBM	164.945.274.000,00	257.839.598.896,00	192.528.709.732,00	33,92%	156,32%
	411211 - PPN Dalam Negeri	163.605.092.000,00	252.516.887.500,00	190.957.166.037,00	32,24%	154,35%
	411212 - PPN Impor	1.128.854.000,00	5.095.943.197,00	1.328.638.261,00	283,55%	451,43%
	411221 - PPnBM Dalam Negeri	138.869.000,00	155.548.126,00	158.586.241,00	-1,92%	112,01%
	411219 - PPN Lainnya	72.459.000,00	68.896.321,00	84.070.058,00	-18,05%	95,08%
	411222 - PPnBM Impor	0,00	1.214.000,00	0,00	100,00%	0,00%
	411229 - PPnBM Lainnya	0,00	1.109.752,00	249.135,00	345,44%	0,00%
B	PPH Non Migas	289.975.686.000,00	252.057.313.844,00	200.131.580.987,00	25,95%	86,92%
	411121 - PPh Pasal 21	128.018.286.000,00	156.218.753.436,00	124.054.864.015,00	25,93%	122,03%
	411128 - PPh Final & FLN	99.202.903.000,00	52.035.270.137,00	45.009.286.038,00	15,61%	52,45%
	411126 - PPh Pasal 25/29 Badan	22.264.213.000,00	15.462.734.703,00	10.080.943.849,00	53,39%	69,45%
	411122 - PPh Pasal 22	17.682.780.000,00	9.336.021.718,00	8.044.967.154,00	16,05%	52,80%
	411124 - PPh Pasal 23	17.092.742.000,00	9.056.461.572,00	7.787.671.326,00	16,29%	52,98%
	411125 - PPh Pasal 25/29 OP	3.873.736.000,00	8.678.035.838,00	4.282.686.008,00	102,63%	224,02%
	411129 - PPh Non Migas Lainnya	1.526.736.000,00	782.781.496,00	728.125.947,00	7,51%	51,27%
	411123 - PPh Pasal 22 Impor	231.143.000,00	483.775.086,00	105.365.445,00	359,14%	209,30%
	411127 - PPh Pasal 26	83.147.000,00	3.479.858,00	37.671.205,00	-90,76%	4,19%
C	Pendapatan atas PL dan PIB	21.970.758.000,00	17.480.909.245,00	17.236.380.977,00	1,42%	79,56%
	411612 - Penjualan Benda Meterai	21.550.527.000,00	17.027.575.445,00	16.916.752.174,00	0,66%	79,01%
	411611 - Bea Meterai	419.706.000,00	452.072.000,00	319.217.000,00	41,62%	107,71%
	411619 - Pajak Tidak Langsung Lainnya	525.000,00	1.261.800,00	411.803,00	206,41%	240,34%
D	PBB dan BPHTB	203.890.000,00	3.054.715.837,00	1.809.000.769,00	68,86%	1498,22%
	411316 - Pendapatan PBB Sektor Pertamb	165.187.000,00	1.810.192.144,00	1.809.000.769,00	0,07%	1095,84%
	411314 - Pendapatan PBB Sektor Perhut	38.703.000,00	1.244.523.693,00	0,00	100,00%	3215,57%
TOTAL		477.095.608.000,00	530.432.537.822,00	411.935.544.635,00	28,77%	111,18%

Sumber: MPN Info s.d 31 Desember 2024

Mayoritas jenis pajak tumbuh positif pada periode ini. Semua jenis pajak yang termasuk dalam kelompok PPN & PPnBM bertumbuh positif, dengan kontribusi penerimaan terbesar berasal dari PPN Dalam Negeri dengan nilai Rp252.516.887.500 (growth 32,24%), dan diikuti PPN Impor dengan nilai Rp5.095.943.197 (growth 283,54%). Sedangkan penopang kinerja penerimaan PPh adalah PPh Pasal 21 dengan nilai Rp124.054.864.015 (growth 25,93%), dan PPh Final & FLN dengan nilai Rp45.009.286.038 (growth 15,61%).

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak	78,10%	117,01%	116,22%	136,30%	104,72%	111,18%

Sumber: Aplikasi Portal DJP

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 lebih baik dibandingkan realisasi pada empat tahun sebelumnya. Capaian signifikan penerimaan pajak pada tahun 2024 didorong oleh membaiknya perekonomian, peningkatan harga komoditas, dan implementasi UU HPP berupa pelaksanaan PPS, penyesuaian tarif PPN, dan PPN PMSE.

Selain itu, capaian kinerja penerimaan pajak tidak terlepas dari pengawasan Wajib Pajak yang mampu mengikutiperkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor, pengelolaan aktivitas PPM dan PKM yang efektif, dan berkurangnya ketidakpastian (uncertainty) siklus usaha pasca pandemi yang mendorong peningkatan tax base PPh dan PPN.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	-	100%	111,18%

Sumber: Aplikasi Portal DJP

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Beberapa hal yang juga melatar belakangi membaiknyakerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

1. Mayoritas sektor-sektor usaha tumbuh positif;
2. Meningkatnya aktivitas impor;
3. Pertumbuhan yang positif secara kumulatif pada kinerja PPM dan PKM; dan
4. Berakhirnya waktu pemberian fasilitas pada sebagian besar sektor.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	100%	111,18%

Sumber: Aplikasi Portal DJP

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami pertumbuhan positif. Membaiknya kinerja PPN Dalam Negeri merupakan salah satu dampak dari kasus Covid19 di Indonesia yang semakin terkendali, meningkatnya konsumsi masyarakat, dan pemulihan kegiatan ekonomi.

Selain itu, capaian kinerja penerimaan pajak tidak terlepas dari pengawasan Wajib Pajak yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor, pengelolaan aktivitas PPM dan PKM yang efektif, dan berkurangnya ketidakpastian (uncertainty) siklus usaha pasca pandemi yang mendorong peningkatan tax base PPh dan PPN.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

1. Melakukan pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak dalam menerbitkan STP;
2. Penelitian dan tindak lanjut hasil data matching;
3. Melakukan analisis perilaku pembayaran WP terhadap aktivitas sektor usaha;
4. Meningkatkan produktivitas dan success rate (melibatkan pemeriksa) atas penerbitan SP2DK di Approweb
5. Sinergi pengawasan dengan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep.

b. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak. Hal-hal tersebut antara lain:

1. Kemampuan SDM dalam mengumpulkan, mengolah, dan memanfaatkan data serta optimalisasi kegiatan pengumpulan data, pengawasan, penagihan, dan pemeriksaan dengan mengedepankan muatan lokal sudah baik;
2. Pemulihan ekonomi dan peningkatan harga komoditas;
3. Aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) yang efektif;
4. Berkurangnya ketidakpastian (uncertainty) siklus usaha pasca pandemi yang mendorong peningkatan tax base PPh dan PPN.

c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

1. Melakukan digitalisasi atas proses kerja;
2. Penempatan SDM dilakukan secara komprehensif, sehingga dapat bekerja dengan efisien dan efektif;
3. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memprioritaskan program-program yang mendukung realisasi penerimaan pajak.

d. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko penerimaan pajak rendah. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

1. Menyelenggarakan sharing session dari pelaksana, AR, fungsional Pemeriksa Pajak, atau pejabat dari KPP lain;
2. Membuat kertas kerja pemetaan jumlah penerimaan per jenis pajak;
3. Pembahasan DSP4.

seluruh mitigasi risiko telah dilaksanakan dengan baik, sehingga risiko terjadinya penerimaan pajak yang rendah dapat diminimalisir

e. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Kemampuan SDM dalam mengumpulkan, mengolah, dan memanfaatkan data yang belum merata, untuk mengatasi kendala tersebut dilakukan sharing session dari pelaksana, AR, fungsional Pemeriksa Pajak, atau pejabat dari KPP lain;

f. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

1. Penerimaan pajak dapat digunakan untuk perlindungan sosial bagi kelompok yang membutuhkan;
2. Untuk pembangunan sarana dan prasarana bagi kelompok yang membutuhkan sarana dan prasarana khusus.

6. Rencana aksi tahun 2025

Guna mendukung keberhasilan pencapaian target pada tahun 2025, KPP Pamekasan akan melakukan beberapa rencana aksi sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan pembayaran masa (PPM) secara rutin;
2. Mengoptimalkan kegiatan pengawasan pembayaran PKM melalui penggalian potensi berbasis sektoral;
3. Melaksanakan tindakan penagihan dengan mengoptimalkan penyelesaian DSPC;
4. Melakukan percepatan penyelesaian pemeriksaan;
5. Melaksanakan IHT secara rutin.

B. (01b-CP) Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

1. Perbandingan antara Target Awal Tahun dengan Realisasi dan Capaian IKU

T/R	Q1	Q2	Sem.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	100,48	105	105	105,00	105,00	105,00	105,00
Capaian	100,48%	105,00%	105,00%	105,00%	105,00%	105,00%	105,00%

Sumber: Aplikasi MANDOR DJP

• Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

• Definisi Indikator Kinerja Utama

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto;

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNPB, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

• Formula Indikator Kinerja Utama

$(50\% \times \text{indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto}) + (50\% \times \text{indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas})$

- Realisasi IKU

Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas tahun 2024 sebesar 105% dengan target IKU sebesar 100%.

Perhitungan pertumbuhan penerimaan pajak bruto tahun 2024 dihitung dari 2 komponen yaitu komponen pertumbuhan historis unit kerja (40%) ditambah dengan komponen pertumbuhan nasional (60%). Realisasi kedua komponen tersebut yaitu komponen pertumbuhan unit kerja sebesar 129,06% dan komponen pertumbuhan nasional sebesar 122,89%

Bruto 2024	Bruto 2023	Pertumbuhan 2024	Pertumbuhan Unit Kerja (%)	Pertumbuhan Nasional (%)	Realisasi Pertumbuhan Bruto
533.991.843.742	413.754.067.418	29,06%	129,06	122,89	120

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

Realisasi Proyeksi perencanaan kas sampai dengan akhir Triwulan IV Tahun 2024 KPP Pratama Pamekasan dapat mencapai realisasi sebesar 90,00%.

Prognosa	Realisasi	Rata-Rata Deviasai	Deviasi Per Triwulan				Deviasai sd. TW4	Realisasi IKU
			TW1	TW2	TW3	TW4		
491.914.761.173	530.432.537.822	11,14%	9,22%	12,30%	11,24%	11,82%	11,15%	90,00%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	IKU Baru pada Tahun 2023				104,70%	105,00%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

Realisasi capaian IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas pada tahun 2024 lebih baik dibandingkan realisasi pada tahun sebelumnya. Capaian penerimaan pajak pada tahun 2024 mendorong tingginya realisasi penerimaan Bruto yang merupakan salah satu faktor penentu IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

1. Melakukan pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak dalam menerbitkan STP;
2. Penelitian dan tindak lanjut hasil data matching;
3. Melakukan analisis perilaku pembayaran WP terhadap aktivitas sektor usaha;
4. Meningkatkan produktivitas dan success rate (melibatkan pemeriksa) atas penerbitan SP2DK di Approweb
5. Melakukan koordinasi dengan seksi pengampu penerimaan terkait penyusunan deviasi proyeksi perencanaan kas;
6. Melakukan perhitungan deviasi proyeksi perencanaan kas dengan presisi;
7. Mengolah dan menyediakan data yang akurat dan terperinci guna meningkatkan penerimaan bruto.

b. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas hampir sama dengan IKU realisasi penerimaan pajak. Hal-hal tersebut antara lain:

1. Kemampuan SDM dalam mengumpulkan, mengolah, dan memanfaatkan data serta optimalisasi kegiatan pengumpulan data, pengawasan, penagihan, dan pemeriksaan dengan mengedepankan muatan lokal sudah baik;
2. Pemulihan ekonomi dan peningkatan harga komoditas;
3. Aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) yang efektif;
4. Berkurangnya ketidakpastian (uncertainty) siklus usaha pasca pandemi yang mendorong peningkatan tax base PPh dan PPN.

c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

1. Melakukan digitalisasi atas proses penyusunan proyeksi perencanaan kas;
2. Penempatan SDM dilakukan secara komprehensif, sehingga dapat bekerja dengan efisien dan efektif;

d. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

kinerja Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas tidak sesuai target. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

1. Menyelenggarakan sharing session dari pelaksana, AR, fungsional Pemeriksa Pajak, atau pejabat dari KPP lain;
2. Membuat Kertas Kerja Simulasi Prognosa Triwulanan;

seluruh mitigasi risiko telah dilaksanakan dengan baik, sehingga risiko Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas tidak sesuai target dapat diminimalisir

e. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

kinerja Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Pembayaran Wajib Pajak yang sudah diprediksi atau tidak sesuai baik secara nominal dan waktu sehingga memberikan deviasi yang cukup besar terhadap proyeksi perencanaan kas, hal tersebut dapat diminimalisir dengan intens berkomunikasi dengan AR pengampu Wajib Pajak.

f. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

1. Pertumbuhan Penerimaan pajak dapat digunakan untuk meningkatkan perlindungan sosial bagi kelompok yang membutuhkan;
2. Untuk meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana bagi kelompok yang membutuhkan sarana dan prasarana khusus.

4. Rencana aksi tahun 2025

Guna mendukung keberhasilan pencapaian target pada tahun 2025, KPP Pamekasan akan melakukan beberapa rencana aksi sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan pembayaran masa (PPM) secara rutin;
2. Mengoptimalkan kegiatan pengawasan pembayaran PKM melalui penggalian potensi berbasis sektoral;
3. Melaksanakan tindakan penagihan dengan mengoptimalkan penyelesaian DSPC;
4. Melakukan percepatan penyelesaian pemeriksaan;
5. Melakukan koordinasi lebih intens dengan seksi pengampu penerimaan utamanya terkait dengan nilai yang ada pada menu komitmen di DRM dan di luar komitmen dari Wajib Pajak.

2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

A. (02a-CP) Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

1. Perbandingan antara Target Awal Tahun dengan Realisasi dan Capaian IKU

T/R	Q1	Q2	Sem.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	16,00%	37,00%	37,00%	63%	63%	100%	100%
Realisasi	14,31%	40,47%	40,47%	65,81%	65,81%	100,48%	100,48%
Capaian	89,44%	109,38%	109,38%	104,46%	104,46%	100,48%	100,48%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

- Definisi Indikator Kinerja Utama

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- Formula Indikator Kinerja Utama

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM / Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM X 100%

- Realisasi IKU

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tahun 2024 sebesar 100,48% dengan target IKU sebesar 100%.

Nama IKU	Target	Realisasi	Realisasi IKU
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	480.433.832.000	482.748.565.249	100,48%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja empat tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	87,66%	143,06%	107,46%	100,48%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan realisasi pada tahun sebelumnya. Capaian Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) yang tinggi mendorong tingginya realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	-	100%	100,48%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Beberapa hal yang juga melatar belakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

1. Mayoritas sektor-sektor usaha tumbuh positif;
2. Meningkatnya aktivitas impor;
3. Pertumbuhan yang positif secara kumulatif pada kinerja PPM dan PKM; dan
4. Berakhirnya waktu pemberian fasilitas pada sebagian besar sektor.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	100%	100,48%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

Penerimaan pajak dari aktifitas PPM sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini tidak terlepas dari pengawasan Wajib Pajak yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor, pengelolaan aktivitas PPM yang efektif, dan berkurangnya ketidakpastian (uncertainty) siklus usaha pasca pandemi yang mendorong peningkatan tax base PPh dan PPN.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM). Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

1. Melakukan pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak dalam menerbitkan STP;
2. Penelitian dan tindak lanjut hasil data matching;
3. Melakukan analisis perilaku pembayaran WP terhadap aktivitas sektor usaha;
4. Meningkatkan produktivitas dan success rate (melibatkan pemeriksa) atas penerbitan SP2DK di Approweb
5. Sinergi pengawasan dengan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep.

b. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM). Hal-hal tersebut antara lain:

1. Kemampuan SDM dalam mengumpulkan, mengolah, dan memanfaatkan data serta optimalisasi kegiatan pengumpulan data, pengawasan, penagihan, dan pemeriksaan dengan mengedepankan muatan lokal sudah baik;
2. Melakukan pengawasan lebih intens terhadap wajib pajak yang setoran per bulannya menurun;
3. Melakukan pengawasan lebih intens terhadap sektor-sektor penentu penerimaan;
4. Selalu berkomunikasi dengan wajib pajak yang pembayaran rutin tiap bulannya cukup besar.

c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

1. Melakukan digitalisasi atas proses pengawasan pembayaran oleh Wajib Pajak;
2. Penempatan SDM dilakukan secara komprehensif, sehingga dapat bekerja dengan efisien dan efektif;

d. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko Penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tidak mencapai target. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah Pengawasan berkala terhadap Wajib Pajak yang belum melaksanakan pembayaran masa secara tertib

seluruh mitigasi risiko telah dilaksanakan dengan baik, sehingga risiko Penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tidak mencapai target dapat diminimalisir

e. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Terdapat penurunan pembayaran oleh Wajib Pajak, untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu dilakukan komunikasi yang intens dengan Wajib Pajak;
2. terdapat Wajib Pajak tertentu yang belum patuh terhadap kewajiban perpajakannya, sehingga harus dilakukan imbauan.

f. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

1. Penerimaan pajak dapat digunakan untuk meningkatkan perlindungan sosial bagi kelompok yang membutuhkan;
2. Untuk meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana bagi kelompok yang membutuhkan sarana dan prasarana khusus.

6. Rencana aksi tahun 2025

Guna mendukung keberhasilan pencapaian target pada tahun 2025, KPP Pamekasan akan melakukan beberapa rencana aksi sebagai berikut:

1. Pengawasan terhadap wajib pajak Bendahara Satker maupun Bendahara Desa;
2. Imbauan untuk mengingatkan pemenuhan kewajiban rutin perpajakan baik itu rutin setor maupun rutin lapor;
3. Pengawasan terhadap wajib pajak yang setoran per bulannya menurun.

B. (02b-CP) Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

1. Perbandingan antara Target Awal Tahun dengan Realisasi dan Capaian IKU

T/R	Q1	Q2	Sem.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
Realisasi	87,00%	99,33%	99,33%	100,96%	100,96%	101,98%	101,98%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	112,18%	112,18%	101,98%	101,98%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

• Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

• Definisi Indikator Kinerja Utama

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu.

• Formula Indikator Kinerja Utama

$$\left[\frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100$$

• Realisasi IKU

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tahun 2024 sebesar 101,98% dengan target IKU sebesar 100%.

Dengan tingkat kepatuhan wajib pajak kewilayahan sebesar 101,88% dan tingkat kepatuhan wajib paja strategis sebesar 112,55%.

Realisasi Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Strategis.

Unit Kerja	Badan	OPK	OPNK	SPT Masuk	WP Wajib SPT Tepat Waktu	WP Wajib SPT Terlambat	Bukan WP Wajib SPT Tepat Waktu	Bukan WP Wajib SPT Terlambat	Wajib SPT	Target SPT	Realisasi IKU
1	2	3	4	5=2+3+4	6	7	8	9	10	11	12= $\frac{(6 \times 1,2) + 7 + 8 + 9}{11} \times 100\%$
NASIONAL	189.472	25.958	30.573	246.003	218.371	24.806	2.334	492	246.508	246.508	117,51%
210. Kanwil DJP Jawa Timur II	9.062	624	1.914	11.600	10.625	904	59	12	11.661	11.661	117,70%
808 - KPP Pratama Pamekasan	272	50	213	535	437	98	0	0	553	553	112,56%

Realisasi Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Kewilayahan.

Unit Kerja	Badan	OPK	OPNK	SPT Masuk	WP Wajib SPT Tepat Waktu	WP Wajib SPT Terlambat	Bukan WP Wajib SPT Tepat Waktu	Bukan WP Wajib SPT Terlambat	Wajib SPT	Target SPT	Realisasi IKU
1	2	3	4	5=2+3+4	6	7	8	9	10	11	12= $\frac{(6 \times 1,2) + 7 + 8 + 9}{11} \times 100\%$
NASIONAL	925.967	12.147.090	2.103.979	15.177.036	9.595.537	1.430.618	3.199.254	852.627	19.026.838	15.792.294	108,38%
210. Kanwil DJP Jawa Timur II	56.333	633.427	110.941	800.701	527.047	45.329	195.704	32.621	1.019.395	846.098	107,09%
808 - KPP Pratama Pamekasan	2.050	43.460	10.135	55.645	32.349	7.700	12.838	2.704	73.660	61.002	101,68%

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja empat tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	101,86%	102,98%	109,94%	101,98%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

Dalam empat tahun terakhir realisasi Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi selalu diatas 100%, namun terdapat penurunan pada tahun 2024 dibandingkan dengan 2023, hal tersebut dikarenakan masih terdapat kekurangan SPT yang belum dilaporkan oleh wajib pajak, terutama dari Wajib Pajak Kewilayahan.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

1. Membentuk satgas Tim SPT Tahunan mulai bulan Februari hingga April untuk memaksimalkan penerimaan SPT Tahunan;
2. Melaksanakan Pojok Pajak di 13 kantor kecamatan se-Kabupaten Pamekasan;
3. Bekerja sama dengan Kemenag untuk himbuan pelaporan pajak Badan (yayasan) di bawah naungan Kemenag;
4. Bekerjasama dengan Dinas Kominfo untuk penggunaan traffic voice terkait pelaporan SPT Tahunan;
5. Membuat iklan himbuan SPT Tahunan melalui Radio Karimata FM.

b. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi. Hal-hal tersebut antara lain:

1. Kemampuan SDM dalam mengimbau Wajib Pajak untuk melaporkan SPT Tahunan PPh dengan mengedepankan muatan lokal sudah baik;
2. Kesadaran Wajib Pajak atas kewajiban perpajakannya meningkat.

c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

1. Melakukan digitalisasi atas proses imbauan kewajiban pelaporan SPT kepada Wajib Pajak;
2. Melakukan koordinasi dengan lembaga pemerintahan yang menaungi banyak Wajib Pajak untuk melaporkan SPT Tahunan PPh;
3. Penempatan SDM dilakukan secara komprehensif, sehingga dapat bekerja dengan efisien dan efektif;

d. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kinerja Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko Kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tidak sesuai Target. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

1. Menyusun media/konten publikasi terkait penyampaian SPT;
2. Membuat Satgas Kepatuhan penyampaian SPT.

seluruh mitigasi risiko telah dilaksanakan dengan baik, sehingga risiko Kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tidak sesuai Target dapat diminimalisir

e. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Sosialisasi pelaporan SPT Tahunan PPh belum merata diseluruh wilayah kerja, untuk itu dilakukan kerja sama dengan lembaga pemerintahan daerah dan radio untuk meratakan sosialisasi pelaporan SPT Tahunan PPh;
2. Terdapat Wajib Pajak tertentu yang belum patuh terhadap kewajiban perpajakannya, sehingga harus dilakukan imbauan.

f. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

1. Penerimaan pajak dapat digunakan untuk meningkatkan perlindungan sosial bagi kelompok yang membutuhkan;
2. Untuk meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana bagi kelompok yang membutuhkan sarana dan prasarana khusus.

4. Rencana aksi tahun 2025

Guna mendukung keberhasilan pencapaian target pada tahun 2025, KPP Pamekasan akan melakukan beberapa rencana aksi sebagai berikut:

1. Penyuluhan kepada wajib pajak akan dilakukan lebih intens;
2. WA blast terhadap wajib pajak yang belum melaporkan SPT Tahunan.

3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi

A. (03a-CP) Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

1. Perbandingan antara Target Awal Tahun dengan Realisasi dan Capaian IKU

T/R	Q1	Q2	Sem.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	27,07%	58,15%	58,15%	82,64%	82,64%	101,42%	101,42%
Capaian	108,28%	116,30%	116,30%	110,19%	110,19%	101,42%	101,42%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

- Definisi Indikator Kinerja Utama

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- Formula Indikator Kinerja Utama

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM / Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM X 100%

- Realisasi IKU

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) tahun 2024 sebesar 101,42% dengan target IKU sebesar 100%.

Nama IKU	Target	Realisasi	Realisasi IKU
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	47.015.548.000	47.683.972.573	101,42%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja Empat tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	82,98%	113,93%	89,79%	101,98%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) pada tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan realisasi pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan seluruh fungsi yang mengampu penerimaan dapat melebihi target yang telah ditentukan.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	-	100%	100,68%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Beberapa hal yang juga melatar belakangi membaiknya kinerja sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

1. data yang bersumber dari approweb maupun dari sumber lain seperti Faktur pajak tanpa NPWP dapat dikelola dengan baik sehingga dapat menghasilkan penerimaan;
2. Rutin berkomunikasi dengan wajib pajak, menjelaskan tentang SP2DK yang diterbitkan baik secara langsung maupun lewat media komunikasi yang lai;
3. Membuat komitmen dengan wajib pajak tentang batas waktu pemenuhan kewajiban perpajakannya.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	100%	100,68%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

Penerimaan pajak dari aktifitas PKM sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini tidak terlepas dari pengawasan Wajib Pajak yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor, pengelolaan aktivitas PKM yang efektif, dan pengelolaan data pemicu yang efektif.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

1. Mengolah data yang bersumber dari approweb maupun dari sumber lain seperti Faktur pajak tanpa NPWP;
2. Melakukan kunjungan ke wajib pajak ;
3. Rutin berkomunikasi dengan wajib pajak, menjelaskan tentang SP2DK yang diterbitkan baik secara langsung maupun lewat media komunikasi yang lain.;
4. Membuat komitmen dengan wajib pajak tentang batas waktu pemenuhan kewajiban perpajakannya.

b. Analisis penyebab kerbehasilan atau peningkatan kinerja

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). Hal-hal tersebut antara lain:

1. Kemampuan SDM dalam mengumpulkan, mengolah, dan memanfaatkan data serta optimalisasi kegiatan pengumpulan data, pengawasan, penagihan, dan pemeriksaan dengan mengedepankan muatan lokal sudah baik;
2. Melakukan penerbitan SP2DK dari data pemicu;
3. Komitmen yang baik dengan wajib pajak tentang batas waktu pemenuhan kewajiban perpajakannya.

c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

1. Melakukan digitalisasi atas proses pengawasan pembayaran oleh Wajib Pajak;
2. Penempatan SDM dilakukan secara komprehensif, sehingga dapat bekerja dengan efisien dan efektif;

d. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko Penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) terhadap penerimaan tidak mencapai target. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

1. Menyelenggarakan sharing session dari pelaksana, AR, fungsional Pemeriksa Pajak, atau pejabat KPP lain;
2. Evaluasi wajib pajak dengan setoran yang naik/turun secara ekstrim dibandingkan setoran tahun lalu

seluruh mitigasi risiko telah dilaksanakan dengan baik, sehingga risiko Penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) terhadap penerimaan tidak mencapai target dapat diminimalisir

e. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

kinerja Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Terdapat penurunan pembayaran oleh Wajib Pajak, untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu dilakukan komunikasi yang intens dengan Wajib Pajak;
2. Terdapat Wajib Pajak tertentu yang belum patuh terhadap kewajiban perpajakannya, sehingga harus dilakukan imbauan.

f. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

1. Penerimaan pajak dapat digunakan untuk meningkatkan perlindungan sosial bagi kelompok yang membutuhkan;
2. Untuk meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana bagi kelompok yang membutuhkan sarana dan prasarana khusus.

6. Rencana aksi tahun 2025

Guna mendukung keberhasilan pencapaian target pada tahun 2025, KPP Pamekasan akan melakukan beberapa rencana aksi sebagai berikut:

1. Mengolah data yang bersumber dari approweb maupun dari sumber lain seperti Faktur pajak tanpa NPWP;
2. Melakukan kunjungan ke wajib pajak;
3. Rutin berkomunikasi dengan wajib pajak, menjelaskan tentang SP2DK yang diterbitkan baik secara langsung maupun lewat media komunikasi yang lain;
4. Membuat komitmen dengan wajib pajak tentang batas waktu pemenuhan kewajiban perpajakannya.

4. Edukasi dan pelayanan yang efektif

A. (04a-CP) Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

1. Perbandingan antara Target Awal Tahun dengan Realisasi dan Capaian IKU

T/R	Q1	Q2	Sem.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
Realisasi	20,08%	70,41%	70,41%	88,80%	88,80%	88,80%	88,80%
Capaian	120,00%						

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- Definisi Indikator Kinerja Utama

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

- Formula Indikator Kinerja Utama

$\{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Lapor}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$

- Realisasi IKU

Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan) tahun 2024 sebesar 88,80% dengan target IKU sebesar 74%. Dengan rincian sebagai berikut:

Kegiatan

	Rencana	Realisasi (Input)	Realisasi (Diakui)	%
Tema1	4	10	4	
Tema2	18	47	18	
Tema3				
One to One	30	72	30	
One to Many	10	35	10	
Total	62	164	62	100,00%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

Perubahan Perilaku

	Target	Perubahan Perilaku	%
Bayar	130	74	56,92%
Lapor	130	170	130,77%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

Rasio

	Capaian	Proporsi
Kegiatan	100,00%	18,50%
Perubahan Perilaku		
Bayar	56,92%	42,18%
Lapor	130,77%	28,12%
Total		88,80%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	84,00%	88,80%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

Dibandingkan tahun sebelumnya, pada tahun 2024 realisasi Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan mengalami kenaikan, hal tersebut disebabkan karena naiknya kegiatan penyuluhan serta perubahan perilaku bayar dan lapor Wajib Pajak yang semakin baik.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

1. Membuat Rencana Kegiatan Penyuluhan yang efektif dan efisien;
2. Melakukan kegiatan edukasi perpajakan;

b. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan. Hal-hal tersebut antara lain:

1. Kemampuan SDM dalam melakukan edukasi dan penyuluhan perpajakan;
2. Tingginya kegiatan edukasi dan penyuluhan perpajakan;
3. Perubahan perilaku bayar dan lapor Wajib Pajak yang semakin baik.

c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

1. Melakukan digitalisasi atas proses penyuluhan dan edukasi ke Wajib Pajak;
2. Penempatan SDM dilakukan secara komprehensif, sehingga dapat bekerja dengan efisien dan efektif;

d. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko Wajib Pajak yang tidak mengetahui kewajiban perpajakannya. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

1. Bekerja sama dengan pemberi kerja, bendahara, dan/atau kelompok untuk edukasi terkait hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak;
2. Meningkatkan peran serta pihak ketiga (Tokoh masyarakat, tax center, atau asosiasi) untuk membantu mensosialisasikan hak dan kewajiban wajib pajak

seluruh mitigasi risiko telah dilaksanakan dengan baik, sehingga risiko Wajib Pajak yang tidak mengetahui kewajiban perpajakannya dapat diminimalisir

e. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Tidak meratanya pemahaman Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya, untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu dilakukan penyuluhan dan edukasi yang intens dan merata kepada Wajib Pajak;.

f. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

1. Penerimaan pajak yang didukung dengan penyuluhan edukasi yang baik dapat digunakan untuk meningkatkan perlindungan sosial bagi kelompok yang membutuhkan;
2. Untuk meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana bagi kelompok yang membutuhkan sarana dan prasarana khusus.

4. Rencana aksi tahun 2025

Guna mendukung keberhasilan pencapaian target Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan pada tahun 2025, KPP Pamekasan akan melakukan beberapa rencana aksi sebagai berikut:

1. Menyusun strategi edukasi dan penyuluhan yang efisien dan efektif;

B. (04b-N) Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan

1. Perbandingan antara Target Awal Tahun dengan Realisasi dan Capaian IKU

T/R	Q1	Q2	Sem.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	5,00%	5,00%	10,00%	5,00%	15,00%	85,00%	100,00%
Realisasi	6,14%	16,00%	16,00%	18,00%	18,00%	110,90%	110,90%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	110,90%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- Definisi Indikator Kinerja Utama

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

- Formula Indikator Kinerja Utama

Indeks Hasil Survei

- Realisasi IKU

Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan tahun 2024 sebesar 110,90% dengan target IKU sebesar 100%. Dengan rincian sebagai berikut:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	82,98%	113,93%	89,79%	101,98%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja Empat tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	85,50%	92,00%	83,24%	110,90%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

Realisasi capaian IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan pada tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan realisasi pada tahun sebelumnya. Hal ini membuktikan bahwa layanan dan penyuluhan yang diberikan oleh KPP Pratama Pamekasan melebihi ekspektasi dari Wajib Pajak.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%	-	100%	110,90%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

Tercapainya target IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan menggambarkan pelayanan dan penyuluhan yang semakin baik. Beberapa hal yang juga melatar belakangi membaiknya kinerja sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

1. Memberikan penyuluhan dan pelayanan secara daring maupun luring secara maksimal;
2. Menentukan longlist responden survei dengan baik.

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

1. Memberikan pelayanan dan penyuluhan dengan berbagai cara, diantaranya secara daring dan luring dengan langsung mendatangi Wajib Pajak;
2. menentukan longlist survey dengan Wajib Pajak yang mudah untuk dihubungi guna pengisian survey.

b. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan. Hal-hal tersebut antara lain:

1. Kemampuan SDM dalam memberikan pelayanan dan penyuluhan perpajakan;
2. Survey yang berjalan efisien dan efektif;

c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

1. Melakukan digitalisasi atas proses pelayanan dan penyuluhan ke Wajib Pajak;
2. Penempatan SDM dilakukan secara komprehensif, sehingga dapat bekerja dengan efisien dan efektif;

d. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko Wajib Pajak yang tidak mengetahui kewajiban perpajakannya. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah dengan memberikan longlist responden survey dengan lengkap dan benar, mitigasi risiko tersebut telah dilaksanakan dengan baik, sehingga indeks kepuasan layanan dan efektifitas penyuluhan dapat dicapai diatas target.

e. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Wajib pajak tidak merespon survey sehingga AR mengimbau untuk mengisi survey.

f. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pelayan dan penyuluhan perpajakan yang baik memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain memudahkan kelompok dengan kebutuhan khusus untuk memperoleh layanan dan penyuluhan perpajakan dengan baik

5. Rencana aksi tahun 2025

Guna meningkatkan Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan pada tahun 2025, KPP Pamekasan akan melaksanakan semua kegiatan edukasi dan pemberian pelayanan baik tatap muka maupun non tatap muka secara maksimal

5. Pengawasan pembayaran masa yang efektif

A. (05a-CP) Persentase pengawasan pembayaran masa

1. Perbandingan antara Target Awal Tahun dengan Realisasi dan Capaian IKU

T/R	Q1	Q2	Sem.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Realisasi	76,25%	116,67%	116,67%	117,00%	117,00%	120,00%	120,00%
Capaian	84,72%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal.

- Definisi Indikator Kinerja Utama

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
- Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah).

- Formula Indikator Kinerja Utama

$(50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis}) + (50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah)})$

- Realisasi IKU

Persentase pengawasan pembayaran masa tahun 2024 sebesar 120% dengan target IKU sebesar 90%. Dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Strategis

Pada pengawasan strategis penyelesaian daftar nominatif STP mencapai 120%, untuk tindak lanjut data perpajakan dapat direalisasikan sebesar 120%, dan juga usulan dinamisasi PPh Pasal 25 sebesar 120%,

Realisasi Kewilayahan

Pada pengawasan kewilayahan penyelesaian daftar nominatif STP mencapai 120%, untuk tindak lanjut data perpajakan dapat direalisasikan sebesar 120%, dan juga usulan dinamisasi PPh Pasal 25 sebesar 120%,

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengawasan pembayaran masa	115,00%	120,00%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

Realisasi capaian IKU Persentase pengawasan pembayaran masa pada tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan realisasi pada tahun sebelumnya. Hal tersebut terjadi karena pada tahun sebelumnya terdapat komponen IKU penambahan Wajib Pajak yang tidak mencapai target yang menyebabkan tidak optimalnya realisasi pada sektor kewilayahan..

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	-	90%	120,00%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

Tercapainya target IKU Persentase pengawasan pembayaran masa menggambarkan pengawasan pembayaran masa yang semakin baik. Beberapa hal yang juga melatar belakangi membaiknya kinerja sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

1. Pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan tahun berjalan;
2. Imbauan pemenuhan kewajiban perpajakan bendahara pemerintah.

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Persentase pengawasan pembayaran masa Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

1. Mengidentifikasi kewajiban perpajakan tahun berjalan;
2. Pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan tahun berjalan;
3. Imbauan pemenuhan kewajiban perpajakan bendahara pemerintah

b. Analisis penyebab kerbehasilan atau peningkatan kinerja

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja Persentase pengawasan pembayaran masa. Hal-hal tersebut antara lain:

1. Kemampuan SDM dalam melakukan pengawasan pembayaran masa;
2. Pengawasan dan Imbauan yang dilakukan berhasil membuat wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakannya;

c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja Persentase pengawasan pembayaran masa dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

1. Melakukan digitalisasi atas proses pengawasan dan imbauan ke Wajib Pajak;
2. Penempatan SDM dilakukan secara komprehensif, sehingga dapat bekerja dengan efisien dan efektif;

d. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Persentase pengawasan pembayaran masa pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi persentase pengawasan pembayaran masa tidak memenuhi target yang ditetapkan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

1. Menyelenggarakan sharing session pengawasan untuk menyeragamkan mekanisme monitoring pembayaran masa
2. Pengawasan secara berkala terhadap wajib pajak yang belum melaksanakan pembayaran pajak secara berkala

mitigasi risiko tersebut telah dilaksanakan dengan baik, sehingga Persentase pengawasan pembayaran masa tidak memenuhi target yang ditetapkan dapat diminimalisir

e. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Persentase pengawasan pembayaran masa dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Wajib pajak tidak merespon Imbauan sehingga AR melakukan visit ke Wajib Pajak.

f. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

1. Penerimaan pajak dapat digunakan untuk meningkatkan perlindungan sosial bagi kelompok yang membutuhkan;
2. Untuk meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana bagi kelompok yang membutuhkan sarana dan prasarana khusus.

5. Rencana aksi tahun 2025

Guna meningkatkan Kinerja Persentase pengawasan pembayaran masa pada tahun 2025, KPP Pamekasan akan melaksanakan:

1. Pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan tahun berjalan;
2. Imbauan pemenuhan kewajiban perpajakan bendahara pemerintah

6. Pengujian kepatuhan material yang efektif

A. (06a-CP) Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

1. Perbandingan antara Target Awal Tahun dengan Realisasi dan Capaian IKU

T/R	Q1	Q2	Sem.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	114,11%	116,67%	116,67%	120,00%	120,00%	115,60%	115,60%
Capaian	114,11%	116,67%	116,67%	120,00%	120,00%	115,60%	115,60%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- Definisi Indikator Kinerja Utama

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

1. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
2. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

- Formula Indikator Kinerja Utama

(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

- Realisasi IKU

Persentase pengawasan pembayaran masa tahun 2024 sebesar 115,60% dengan target IKU sebesar 100%. Dengan rincian sebagai berikut:

1. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis dapat merealisasikan sebesar 120%;
2. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya sebesar 111,50%

sehingga jika dihitung menggunakan formula IKU realisasi keseluruhan sebesar 115,60%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja dua tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	120,00%	120,00%	115,60%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

Realisasi capaian IKU PPersentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan realisasi pada tahun sebelumnya. Hal tersebut terjadi karena pada tahun 2024 Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya sebesar tidak mencapai 120% yang disebabkan komponen kualitas LHP2DK mendapat capaian sebesar 105,83.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	-	100%	115,60%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

Tercapainya target IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dapat melebihi renstra DJP. Beberapa hal yang juga melatar belakangi membaiknya kinerja sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

1. Melakukan penelitian pemenuhan kewajiban perpajakan sektor industri pengolahan tembakau yang datanya bersumber dari formulir CK1;
2. Melakukan tindaklanjut data pemicu, data penguji prioritas, data penguji prioritas tambahan, LHA dan LIIP.

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

1. Bekerja sama dengan DJBC untuk pertukaran data;
2. Melakukan penelitian pemenuhan kewajiban perpajakan sektor industri pengolahan tembakau yang datanya bersumber dari CK1;
3. Pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan tahun berjalan;
4. Melakukan tindaklanjut data pemicu, data penguji prioritas, data penguji prioritas tambahan, LHA dan LIIP.

b. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan. Hal-hal tersebut antara lain:

1. Kemampuan SDM dalam melakukan analisis data;
2. sinergi yang baik dengan DJBC untuk penyediaan data formulir C1;

c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

1. Melakukan digitalisasi atas proses analisis data Wajib Pajak;
2. Penempatan SDM dilakukan secara komprehensif, sehingga dapat bekerja dengan efisien dan efektif;

d. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi Penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP yang dilakukan oleh AR tidak memenuhi target yang ditetapkan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah Mengadakan sharing session dan/atau rapat monitoring penyelesaian SP2DK mitigasi risiko tersebut telah dilaksanakan dengan baik, sehingga risiko dapat diminimalisir

e. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Wajib Pajak tidak merespon SP2DK yang dikirimkan oleh AR, untuk mengatasi hal tersebut AR melakukan komunikasi yang lebih intens atau melakukan visik ke Wajib Pajak;
2. SP2DK yang dikirimkan secara fisik tidak sampai ke Wajib Pajak, hal tersebut dapat diatasi dengan mengirimkan sofffile ke Wajib Pajak

f. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

1. Data yang diperoleh dapat meningkatkan penerimaan pajak dapat digunakan untuk meningkatkan perlindungan sosial bagi kelompok yang membutuhkan;
2. Data yang diperoleh dapat meningkatkan penerimaan pajak untuk meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana bagi kelompok yang membutuhkan sarana dan prasarana khusus.

5. Rencana aksi tahun 2025

Guna meningkatkan Kinerja P
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan pada tahun 2025, KPP Pamekasan akan melaksanakan:

1. Melakukan penelitian pemenuhan kewajiban perpajakan sektor industri pengolahan tembakau yang datanya bersumber dari CK1;
2. Melakukan tindaklanjut data pemicu, data penguji prioritas, data penguji prioritas tambahan, LHA dan LIIP

B. (06b-N) Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan

1. Perbandingan antara Target Awal Tahun dengan Realisasi dan Capaian IKU

T/R	Q1	Q2	Sem.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	71,51%	116,52%	116,52%	114,80%	114,80%	120,00%	120,00%
Capaian	71,51%	116,52%	116,52%	114,80%	114,80%	120,00%	120,00%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- Definisi Indikator Kinerja Utama

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Data STP
2. Pemanfaatan Data Matching

- Formula Indikator Kinerja Utama

$$\frac{(\text{Capaian Pemanfaatan Data STP}) + (\text{Capaian Pemanfaatan Data Matching})}{2}$$

- Realisasi IKU

Persentase pengawasan pembayaran masa tahun 2024 sebesar 120% dengan target IKU sebesar 100%. Dengan rincian sebagai berikut:

- Persentase penyelesaian pemanfaatan data STP sebesar 120%;
- Persentase pemanfaatan data matching sebesar 120%

sehingga jika dihitung menggunakan formula IKU realisasi keseluruhan sebesar 120%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan	120,00%	120,00%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

Realisasi capaian IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan pada tahun 2024 samatingnya dengan realisasi pada tahun sebelumnya.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

1. Menindaklanjuti daftar nominatif STP selain tahun berjalan di Aplikasi Approweb;
2. Menindaklanjuti data pemicu selain tahun berjalan di aplikasi Approweb.

b. Analisis penyebab kerbehasilan atau peningkatan kinerja

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan. Hal-hal tersebut antara lain:

1. Kemampuan SDM dalam menindaklanjuti data STP sudah baik;
2. Kemampuan SDM dalam menindaklanjuti data pemicu sudah baik;

c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

1. Melakukan digitalisasi atas proses menindaklanjuti data STP dan data pemicu;
2. Penempatan SDM dilakukan secara komprehensif, sehingga dapat bekerja dengan efisien dan efektif;

d. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi Pemanfaatan data selain tahun berjalan belum optimal. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah Melakukan monitoring penerbitan STP dan Pemanfaatan Data Matching dengan kertas kerja, mitigasi risiko tersebut telah dilaksanakan dengan baik, sehingga risiko dapat diminimalisir

e. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Data STP dan Data pemicu yang diturunkan dari kantor pusat DJP terkadang tidak dapat ditindaklanjuti, sehingga harus dilakukan filter agar data-data yang tidak bisa ditindaklanjuti tidak terhitung sebagai realisasi IKU

f. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

1. Data STP dan Data Pemicu yang ditindaklanjuti dapat meningkatkan penerimaan pajak dapat digunakan untuk meningkatkan perlindungan sosial bagi kelompok yang membutuhkan;
2. Data STP dan Data Pemicu dapat meningkatkan penerimaan pajak untuk meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana bagi kelompok yang membutuhkan sarana dan prasarana khusus.

4. Rencana aksi tahun 2025

Guna meningkatkan Kinerja Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan pada tahun 2025, KPP Pamekasan akan melaksanakan:

1. Menindaklanjuti daftar nominatif STP selain tahun berjalan di Aplikasi Approweb;
2. Menindaklanjuti data pemicu selain tahun berjalan di aplikasi Approweb .

C. (06c-N) Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

1. Perbandingan antara Target Awal Tahun dengan Realisasi dan Capaian IKU

T/R	Q1	Q2	Sem.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	92,91%	97,23%	97,23%	103,47%	103,47%	117,85%	117,85%
Capaian	92,91%	97,23%	97,23%	103,47%	103,47%	117,85%	117,85%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- Definisi Indikator Kinerja Utama

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

- Formula Indikator Kinerja Utama

30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan

- Realisasi IKU

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu sebesar 117,89% dengan target IKU sebesar 100%. Dengan rincian sebagai berikut:

- Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP sebesar 120%;
- Kualitas pelaksanaan komite kepatuhan sebesar 114,72%
- Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan sebesar 120%.

sehingga jika dihitung menggunakan formula IKU realisasi keseluruhan sebesar 117,89%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	IKU Baru Tahun 2024	117,89%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

1. Melakukan pengelolaan Komite Kepatuhan dengan cepat dan tepat sehingga dapat diselesaikan tepat waktu.

b. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu. Hal-hal tersebut antara lain:

1. Ketepatan pelaporan komite kepatuhan;
2. Kemampuan SDM dalam menghitung bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM sudah baik;

c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

1. Melakukan digitalisasi atas proses kerja komite kepatuhan wajib pajak;
2. Penempatan SDM dilakukan secara komprehensif, sehingga dapat bekerja dengan efisien dan efektif;

d. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP lebih rendah dari target Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah Mengadakan Rapat Pembahasan dan Penetapan DPP dan DSPE, mitigasi risiko tersebut telah dilaksanakan dengan baik, sehingga risiko dapat diminimalisir

e. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Sulitnya untuk menetapkan DPP dan DSPE sehingga dilakukan rapat pembahasan untuk menentukan DPP dan DSPE.

f. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

1. Komite kepatuhan Wajib Pajak yang andal dapat meningkatkan penerimaan pajak dapat digunakan untuk meningkatkan perlindungan sosial bagi kelompok yang membutuhkan;
2. Komite kepatuhan Wajib Pajak yang andal dapat meningkatkan penerimaan pajak untuk meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana bagi kelompok yang membutuhkan sarana dan prasarana khusus.

4. Rencana aksi tahun 2025

Guna meningkatkan Kinerja Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu pada tahun 2025, KPP Pamekasan akan melaksanakan Melakukan pengelolaan Komite Kepatuhan dengan cepat dan tepat sehingga dapat diselesaikan tepat waktu.

7. Penegakan hukum yang efektif

A. (07a-CP) Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

1. Perbandingan antara Target Awal Tahun dengan Realisasi dan Capaian IKU

T/R	Q1	Q2	Sem.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	72,00%	115,02%	115,02%	118,58%	118,58%	118,58%	118,58%
Capaian	72,00%	115,02%	115,02%	118,58%	118,58%	118,58%	118,58%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

- Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- Definisi Indikator Kinerja Utama

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

1. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan
2. Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

- Formula Indikator Kinerja Utama

(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%) + (Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40%)

- Realisasi IKU

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu sebesar 118,58% dengan target IKU sebesar 100%. Dengan rincian sebagai berikut:

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	IKU Baru Tahun 2024	118,58%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

1. Percepatan penyelesaian tunggakan pemeriksaan.

b. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian. Hal-hal tersebut antara lain:

1. Percepatan penyelesaian pemeriksaan;
2. Kemampuan SDM dalam menghitung bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM sudah baik;

c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

1. Melakukan digitalisasi atas proses kerja pemeriksaan;
2. Penempatan SDM dilakukan secara komprehensif, sehingga dapat bekerja dengan efisien dan efektif;

d. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Adanya tunggakan pemeriksaan yang harus segera diselesaikan, sehingga perlu dilakukan percepatan pemeriksaan.

e. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

1. Pemeriksaan dan penilaian yang efektif dapat meningkatkan penerimaan pajak dapat digunakan untuk meningkatkan perlindungan sosial bagi kelompok yang membutuhkan;
2. Pemeriksaan dan penilaian yang efektif dapat meningkatkan penerimaan pajak untuk meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana bagi kelompok yang membutuhkan sarana dan prasarana khusus.

4. Rencana aksi tahun 2025

Guna meningkatkan kat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian pada tahun 2025, KPP Pratama Pamekasan akan melakukan permintaan usulan pemeriksaan ke Seksi Pengawasan dan Fungsional Pemeriksa Pajak .

B. (07b-CP) Tingkat efektivitas penagihan

1. Perbandingan antara Target Awal Tahun dengan Realisasi dan Capaian IKU

T/R	Q1	Q2	Sem.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
Realisasi	26,50%	77,43%	77,43%	76,99%	76,99%	93,02%	93,02%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

- Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- Definisi Indikator Kinerja Utama

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);
2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

- Formula Indikator Kinerja Utama

$(50\% \times \text{Variabel Tindakan Penagihan}) + (20\% \times \text{Variabel Tindak Lanjut DSPC}) + (30\% \times \text{Variabel Pencairan DSPC})$

- Realisasi IKU

Tingkat efektivitas penagihan sebesar 93,02% dengan target IKU sebesar 75%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas penagihan	96,43%	93,02%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

Realisasi capaian IKU Tingkat efektivitas penagihan pada tahun 2024 lebih rendah dibandingkan dengan realisasi pada tahun sebelumnya. Namun untuk capaian IKU sama tingginya dengan tahun yang lalu sebesar 120.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Tingkat efektivitas penagihan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

1. Membuat dan menyampaikan Surat Teguran tepat waktu;
2. Menyampaikan Surat Paksa terhadap Wajib Pajak Prioritas yang memiliki kemampuan bayar;
3. Melaksanakan dan membuat Surat Pemblokiran Rekening kepada Bank/Lembaga Keuangan Lainnya, terhadap Wajib Pajak dengan tunggakan terbesar .

b. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja Tingkat efektivitas penagihan. Hal-hal tersebut antara lain:

1. Membuat daftar prioritas penagihan;
2. Kemampuan SDM dalam melakukan tindakan penagihan aktif secara efisien dan efektif.

c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

1. Melakukan digitalisasi dalam proses penyusunan daftar prioritas penagihan;
2. Penempatan SDM dilakukan secara komprehensif, sehingga dapat bekerja dengan efisien dan efektif;

d. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Tingkat efektivitas penagihan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Adanya penolakan dari Wajib Pajak saat dilakukan penagihan aktif, untuk mengatasi permasalahan tersebut dilakukan upaya secara persuasif untuk menghindari konflik dengan Wajib Pajak.

e. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

1. Penagihan aktif yang efektif dapat meningkatkan penerimaan pajak dapat digunakan untuk meningkatkan perlindungan sosial bagi kelompok yang membutuhkan;
2. Penagihan aktif yang efektif dapat meningkatkan penerimaan pajak untuk meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana bagi kelompok yang membutuhkan sarana dan prasarana khusus.

4. Rencana aksi tahun 2025

Guna meningkatkan kat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian pada tahun 2025, KPP Pratama Pamekasan akan melakukan:

1. Penyampaian Surat Teguran terhadap seluruh tunggakan pajak secara rutin dan tepat waktu;
2. Penyampaian Surat Paksa terhadap Wajib Pajak Prioritas yang memiliki kemampuan bayar;
3. Melaksanakan Pemblokiran dari Wajib Pajak dengan tunggakan terbesar;
4. Menindaklanjuti Data DSPC Penagihan;
5. Melakukan Sita Aset terhadap Wajib Pajak yang memiliki tunggakan terbesar

C. (07c-N) Tingkat efektivitas penagihan

1. Perbandingan antara Target Awal Tahun dengan Realisasi dan Capaian IKU

T/R	Q1	Q2	Sem.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Capaian	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

- Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- Definisi Indikator Kinerja Utama

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

- Formula Indikator Kinerja Utama

Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah / Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah X 100%

- Realisasi IKU

Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan sebesar 100% dengan target IKU sebesar 100%. Target yang diberikan sebanyak 1 usulan yang disetujui untuk dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, sampai dengan akhir tahun 2024 KPP Pratama Pamekasan berhasil mengusulkan 1 usulan pemeriksaan bukti permulaan yang disetujui untuk ditindaklanjuti.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	IKU Baru pada Tahun 2024	100,00%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

1. Melakukan pengumpulan data, analisis, dan tindakan pengawasan sesuai prosedur;
2. Melakukan kegiatan kolaborasi dengan PPNS Kanwil DJP Jawa Timur II ;
3. memastikan atas WP yang diusulkan sudah dilakukan edukasi perpajakan dan kegiatan pengawasan.

b. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan. Hal-hal tersebut antara lain:

1. Analisis dan pengumpulan data Wajib Pajak yang berpotensi untuk diusulkan pemeriksaan bukti permulaan berjalan dengan baik

c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

1. Melakukan digitalisasi dalam proses analisis dan pengumpulan data Wajib Pajak;
2. Penempatan SDM dilakukan secara komprehensif, sehingga dapat bekerja dengan efisien dan efektif;

d. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. data WP yang memenuhi kriteria untuk diusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan sulit untuk dicari, sehingga memerlukan analisis yang lebih untuk menemukan Wajib Pajak yang dapat diusulkan.

e. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

1. Pemeriksaan bukti permulaan dapat meningkatkan penerimaan pajak dapat digunakan untuk meningkatkan perlindungan sosial bagi kelompok yang membutuhkan;
2. Pemeriksaan bukti permulaan dapat meningkatkan penerimaan pajak untuk meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana bagi kelompok yang membutuhkan sarana dan prasarana khusus.

4. Rencana aksi tahun 2025

Guna meningkatkan kat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian pada tahun 2025, KPP Pratama Pamekasan akan melakukan:

1. Mengumpulkan data dan melakukan analisis data atas WP yang memenuhi kriteria;
2. Berkoordinasi dengan Kanwil DJP Jawa Timur II

8. Data dan informasi yang berkualitas

A. (08a-CP) Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan

1. Perbandingan antara Target Awal Tahun dengan Realisasi dan Capaian IKU

T/R	Q1	Q2	Sem.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
Realisasi	8,23%	69,99%	69,99%	112,34%	112,34%	120,00%	120,00%
Capaian	41,15%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

- Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- Definisi Indikator Kinerja Utama

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan.

- Formula Indikator Kinerja Utama

$$\{(\text{Persentase penyelesaian laporan kegiatan pengamatan} + \text{Persentase penyediaan data potensi perpajakan}) / 2\} \times 100\%$$

- Realisasi IKU

Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan sebesar 120% dengan target IKU sebesar 100%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	120,00%	120,00%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

Realisasi capaian IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan pada tahun 2024 samatingnya dengan realisasi pada tahun sebelumnya.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

1. Melakukan kegiatan penyisiran untuk pengumpulan data KPDL dan untuk ke depannya didukung oleh aplikasi Matoa;
2. Melakukan kegiatan pengamatan di tempat usaha wajib pajak dengan membentuk beberapa tim pengamat;

b. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan. Hal-hal tersebut antara lain:

1. Tim pengamatan yang bekerja secara efisien dan efektif saat melakukan pengamatan;
2. Dukungan teknologi berupa aplikasi Matoa yang mempermudah kegiatan pengumpulan data potensi perpajakan.

c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

1. Melakukan digitalisasi dalam proses pengumpulan data dan potensi perpajakan;
2. Penempatan SDM dilakukan secara komprehensif, sehingga dapat bekerja dengan efisien dan efektif;

d. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Luasnya wilayah kerja KPP Pratama Pamekasan yang harus disisir untuk menggali potensi perpajakan, untuk itu dilakukan pemetaan agar penggalian potensi perpajakan dapat berjalan dengan efisien dan efektif.

e. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

1. Kegiatan pengamatan dan data potensi perpajakan dapat meningkatkan penerimaan pajak dapat digunakan untuk meningkatkan perlindungan sosial bagi kelompok yang membutuhkan;
2. Kegiatan pengamatan dan data potensi perpajakan dapat meningkatkan penerimaan pajak untuk meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana bagi kelompok yang membutuhkan sarana dan prasarana khusus.

4. Rencana aksi tahun 2025

Guna meningkatkan Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan pada tahun 2025, KPP Pratama Pamekasan akan melakukan:

1. Melakukan kegiatan penyisiran untuk pengumpulan data KPDL dan untuk ke depannya didukung oleh aplikasi Mator;
2. Membentuk Tim Pengamatan.

B. (08b-CP) Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

1. Perbandingan antara Target Awal Tahun dengan Realisasi dan Capaian IKU

T/R	Q1	Q2	Sem.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
Realisasi	60,04%	57,13%	57,13%	57,13%	57,13%	82,33%	82,33%
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

- Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- Definisi Indikator Kinerja Utama

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP. ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah.

- Formula Indikator Kinerja Utama

$$[30\% \times ((\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\%) + (\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\%))]]$$

- Realisasi IKU

Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan sebesar 82,33% dengan target IKU sebesar 55%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	69,00%	82,33%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

Realisasi capaian IKU PPersentase penghimpunan data regional dari ILAP pada tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan dengan realisasi pada tahun sebelumnya, ha tersebut menunjukkan semakin andalnya SDM KPP Pratama Pamekasan dalam penghimpunan data regional dari ILAP.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Persentase penghimpunan data regional dari ILAP. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

1. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait di Pemkab Pamekasan;
2. Melakukan pendampingan kepada intansi terkait di Pemkab Pamekasan agar dapat menyetorkan data ILAP dengan benar dan tepat waktu.

b. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja Persentase penghimpunan data regional dari ILAP. Hal-hal tersebut antara lain:

1. Koordinasi yang baik telah terjalin dengan instansi terkait di pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan

c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja Persentase penghimpunan data regional dari ILAP dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

1. Melakukan digitalisasi dalam proses penghimpunan data regional dari ILAP;
2. Penempatan SDM dilakukan secara komprehensif, sehingga dapat bekerja dengan efisien dan efektif;

d. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Persentase penghimpunan data regional dari ILAP dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Terdapat instansi pemerintah di lingkungan Pemkab Pamekasan yang tidak bersedia menyetorkan data yang diminta dikarenakan belum adanya PKS, hal tersebut dapat diminimalisir dengan tetap berkoordinasi dengan instansi tersebut.

e. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

1. Data regional dari ILAP dapat meningkatkan penerimaan pajak dapat digunakan untuk meningkatkan perlindungan sosial bagi kelompok yang membutuhkan;
2. Data regional dari ILAP dapat meningkatkan penerimaan pajak untuk meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana bagi kelompok yang membutuhkan sarana dan prasarana khusus.

4. Rencana aksi tahun 2025

Guna meningkatkan Persentase penghimpunan data regional dari ILAP pada tahun 2025, KPP Pratama Pamekasan akan melakukan:

1. Untuk memaksimalkan IKU, maka diperlukan koordinasi dengan Kanwil DJP Jawa Timur II dengan tujuan agar pihak Kanwil dapat mengkoordinasikan dengan DIP untuk bisa melakukan penyesuaian ulang target.

9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

A. (09a-N) Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

1. Perbandingan antara Target Awal Tahun dengan Realisasi dan Capaian IKU

T/R	Q1	Q2	Sem.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	120	120	120	120	120	117,49	117,49
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	117,49%	117,49%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

- Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- Definisi Indikator Kinerja Utama

Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

1. Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;
2. Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;
3. Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

- Formula Indikator Kinerja Utama

(Capaian Komponen 1 X 50%) + (Capaian Komponen 2 X 50%)

- Realisasi IKU

Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM sebesar 117,49% dengan target IKU sebesar 100%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	IKU baru pada tahun 2024	117,49%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

1. Mengundang Peserta Uji Kompetensi untuk menghadiri kegiatan Tax Camp / Kelas pembahasan materi Uji Kompetensi;
2. Mengundang seluruh pegawai untuk menghadiri kegiatan IHT baik yang diselenggarakan di dalam kantor ataupun dari luar kantor melalui daring.

b. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM. Hal-hal tersebut antara lain:

1. Berhasilnya kegiatan Tax Camp / Kelas pembahasan materi Uji Kompetensi;
2. Kegiatan pembinaan mental yang berjalan efisien dan efektif.

c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

1. Melakukan kegiatan Tax Camp / Kelas pembahasan materi Uji Kompetensi secara daring;
2. Menyelenggarakan pembinaan mental bersamaan dengan kegiatan lainnya.

d. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Saat pelaksanaan uji kompetensi rawan terjadi kendala jaringan, sehingga harus dilakukan pembenahan jaringan terlebih dahulu.

e. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI).

Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

1. Organisasi dan SDM yang berkualitas dapat meningkatkan penerimaan pajak dapat digunakan untuk meningkatkan perlindungan sosial bagi kelompok yang membutuhkan;
2. Organisasi dan SDM yang berkualitas dapat meningkatkan penerimaan pajak untuk meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana bagi kelompok yang membutuhkan sarana dan prasarana khusus.

4. Rencana aksi tahun 2025

Guna meningkatkan Capaian Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM pada tahun 2025, KPP Pratama Pamekasan akan melakukan:

1. Menyusun materi dan jadwal pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM

B. (09b-N) Indeks Penilaian Integritas Unit

1. Perbandingan antara Target Awal Tahun dengan Realisasi dan Capaian IKU

T/R	Q1	Q2	Sem.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	-	-	-	85	85	85	85
Realisasi	-	-	-	100	100	98,35	98,35
Capaian	0.00%	0.00%	0.00%	117.65%	117.65%	115.71%	115.71%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

- Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- Definisi Indikator Kinerja Utama

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;
2. pengawasan kepatuhan;
3. pemeriksaan pajak;
4. penagihan pajak.

- Formula Indikator Kinerja Utama

Hasil Survei Penilaian Integritas Unit yang dilakukan kepada responden.

- Realisasi IKU

Indeks Penilaian Integritas Unit sebesar 98,35 dengan target IKU sebesar 85.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	96,13	98,35%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

Realisasi capaian IKU Indeks Penilaian Integritas Unit pada tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan dengan realisasi pada tahun sebelumnya, hal tersebut menunjukkan semakin meningkatnya integritas unit diseluruh bidang, baik di pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pajak.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Indeks Penilaian Integritas Unit. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

1. Mengirimkan longlist responden dengan benar dan lengkap.

b. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja Indeks Penilaian Integritas Unit. Hal-hal tersebut antara lain:

1. Longlist yang disampaikan sudah memenuhi kriteria;
2. Wajib Pajak yang menjadi responden mengisi survey dengan baik.

c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja Indeks Penilaian Integritas Unit dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

1. Melakukan survey secara daring;
2. Mengingatkan wajib pajak yang menjadi responden survey untuk mengisi survey secara daring.

d. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Indeks Penilaian Integritas Unit dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Wajib Pajak yang menjadi responden tidak menerima tautan survey, untuk memitigasi hal tersebut sebelum mengirimkan responden survey dilakukan konfirmasi data email ke calon responden melalui AR pengampu.
2. Wajib Pajak yang menjadi responden tidak mengisi survey, untuk memitigasi hal tersebut responden akan diingatkan melalaui WaA Blast

e. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

1. Tingginya tingkat integritas unit dapat meningkatkan penerimaan pajak dapat digunakan untuk meningkatkan perlindungan sosial bagi kelompok yang membutuhkan;
2. Tingginya tingkat integritas unit dapat meningkatkan penerimaan pajak untuk meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana bagi kelompok yang membutuhkan sarana dan prasarana khusus.

4. Rencana aksi tahun 2025

Guna meningkatkan Capaian Indeks Penilaian Integritas Unit pada tahun 2025, KPP Pratama Pamekasan akan melakukan:

1. Membuat konten edukasi terkait pengisian survey di Media Sosial;
2. Pengampu dari masing masing seksi (Pelayanan, Penagihan, Pengawasan) menghubungi responden untuk mengisi survey.

C. (09c-N) Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko

1. Perbandingan antara Target Awal Tahun dengan Realisasi dan Capaian IKU

T/R	Q1	Q2	Sem.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	23	47	47	70	70	90	90
Realisasi	32	54	54	89,59	89,59	99,51	99,51
Capaian	120,00%	115,26%	115,26%	120,00%	120,00%	110,57%	110,57%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

- Deskripsi Sasaran Strategis

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

1. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja;
2. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi.

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu.

Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan.

Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

- Formula Indikator Kinerja Utama

Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko

- Realisasi IKU

Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko sebesar 99,51 dengan target IKU sebesar 90.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	IKU baru tahun pada 2024	99,51%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

1. Mempersiapkan Laporan NKO dan laporan Mitigasi Risiko;
2. Merekapitulasi data dukung dari berbagai seksi;
3. Melaksanakan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi dan melaporkan tepat waktu.

b. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko. Hal-hal tersebut antara lain:

1. Pelaksanaan dan pelaporan DKO dilakukan tepat waktu;
2. melaksanakan seluruh rencana aksi mitigasi risiko yang telah ditetapkan, dan melaporkan tepat waktu.

c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengumpulan bukti dukung dari masing-masing seksi pengampu secara digital;
2. Menyelenggarakan DKRO bersamaan dengan kegiatan lainnya.

d. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. NKO yang tersedia pada dashbord NKO tidak sesuai dengan keadaan sesungguhnya, untuk mengatasi hal tersebut dapat dilakukan dengan hitung manual NKO.

e. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

1. Mitigasi risiko yang baik dapat meningkatkan penerimaan pajak dapat digunakan untuk meningkatkan perlindungan sosial bagi kelompok yang membutuhkan;
2. Mitigasi risiko yang baik dapat meningkatkan penerimaan pajak untuk meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana bagi kelompok yang membutuhkan sarana dan prasarana khusus.

4. Rencana aksi tahun 2025

Guna meningkatkan Capaian Indeks Penilaian Integritas Unit pada tahun 2025, KPP Pratama Pamekasan akan Meningkatkan koordinasi dengan seksi dan pihak terkait agar penyusunan NKO dan pelaksanaan DKRO dapat terlaksana dengan baik.

10. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

A. (10a-CP) Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

1. Perbandingan antara Target Awal Tahun dengan Realisasi dan Capaian IKU

T/R	Q1	Q2	Sem.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	105,00	107,72	107,72	105,67	105,67	120,00	120,00
Capaian	105.00%	107.72%	107.72%	105.67%	105.67%	120.00%	120.00%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

- Definisi Indikator Kinerja Utama

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

- Formula Indikator Kinerja Utama

(50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100)

- Realisasi IKU

Tingkat Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran sebesar 120 dengan target IKU sebesar 100, dengan rincian sebagai berikut:

1. Nilai Kinerja SMART sebesar 100;
2. Nilai Kinerja Pelaksanaan anggaran sebesar 98,55.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,48	120

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

realisasi pada tahun sebesar 120, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal tersebut disebabkan karena adanya peningkatan penyerapan anggaran di tahun 2024 dan perencanaan anggaran yang lebih baik.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	-	100	120

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

Tercapainya target IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran menggambarkan perencanaan dan penyerapan anggaran yang dilakukan di 2024 sudah sangat baik.

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

1. Melakukan Revisi Anggaran Belanja Barang Modal;
2. Percepatan Pencairan Belanja Barang;
3. Menyusun RPD bulanan dengan baik.

b. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran. Hal-hal tersebut antara lain:

1. Pelaksanaan revisi anggaran yang baik;
2. Percepatan belanja barang;
3. RPD bulanan yang efisien dan efektif.

c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

1. Melakukan digitalisasi saat proses revisi anggaran;

d. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Persentase pengawasan pembayaran masa pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tidak Tercapai. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah Menyelenggarakan rapat Tim Pengelola Keuangan, mitigasi risiko tersebut telah dilaksanakan dengan baik, sehingga Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tidak Tercapai dapat diminimalisir

e. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Persentase pengawasan pembayaran masa dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Realisasi RPD yang terkadang tidak dapat diprediksi, untuk mengatasi kendala tersebut maka dibuat kertas kerja RPD dengan memperhatikan histori RPD periode sebelumnya.

e. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

1. Tingginya Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dapat meningkatkan penerimaan pajak dapat digunakan untuk meningkatkan perlindungan sosial bagi kelompok yang membutuhkan;
2. Tingginya Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dapat meningkatkan penerimaan pajak untuk meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana bagi kelompok yang membutuhkan sarana dan prasarana khusus.

4. Rencana aksi tahun 2025

Guna meningkatkan Capaian Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran pada tahun 2025, KPP Pratama Pamekasan akan melakukan:

1. Membuat RPD bulanan yang lebih baik;
2. Melakukan revisi anggaran sesuai dengan kebutuhan organisasi.

REALISASI ANGGARAN

Selama Tahun Anggaran 2024 KPP Pratama Pamekasan telah merealisasikan anggaran sebesar RP6.423.056.317 dari total anggaran RP6.439.605.000 atau sebesar 99,74%, dengan sisa anggaran sebanyak RP16.548.683.

Rincian Anggaran Tahun Anggaran 2024:

DIPA TA 2024:

16%  **RP1.029.923.000** Program Pengelolaan Penerimaan Negara

84%  **RP5.409.682.000** Program Dukungan Manajemen

Realisasi TA 2024:

98,88%  **RP1.018.376.216** Program Pengelolaan Penerimaan Negara

99,91%  **RP5.404.680.101** Program Dukungan Manajemen



BAB IV PENUTUP

Kata Penutup

Laporan Kinerja ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi KPP Pratama Pamekasan menuju *good governance* dengan mengacu pada Rencana Strategis DJP tahun 2021 - 2024. Penyusunan Laporan Kinerja KPP Pratama Pamekasan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja KPP Pratama Pamekasan merupakan hasil evaluasi kinerja KPP Pratama Pamekasan selama satu tahun anggaran yang berisikan tentang kegiatan pelaksanaan tugas dibidang administrasi dan kebijakan perpajakan yang tertuang dalam indikator kinerja utama KPP Pratama Pamekasan. Hasil evaluasi tersebut diharapkan sebagai alat penilai kinerja kuantitatif yang menggambarkan DJP secara transparan serta dapat menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Penyusunan LAKIN sejalan dengan program Anggaran Berbasis Kinerja dan *Balanced Scorecard* atau Indikator Kinerja Utama dari program dan kegiatan KPP Pratama Pamekasan.

Pencapaian kinerja organisasi merupakan perwujudan atas perencanaan dan pemenuhan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Akan tetapi akan selalu ada faktor-faktor penghambat yang dihadapi dalam kaitan pelaksanaan pekerjaan. Secara umum pencapaian IKU pada tahun 2024 sudah sesuai dengan target yang ditetapkan. Dari 20 IKU yang menjadi target, KPP Pratama Pamekasan berhasil mencapai melebihi target dari seluruh IKU.

Dengan disusunnya LAKIN Kantor Pelayanan Pajak Pamekasan, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan, baik kepada jajaran pimpinan di Direktorat Jenderal Pajak, maupun seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pamekasan sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya.



LAPORAN KINERJA 2024

KPP Pratama Pamekasan